

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENDIDIKAN ANAK DENGAN DISABILITAS

oleh:

Ranti Novianti

Program Studi Pendidikan Luar Biasa
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Islam Nusantara, Bandung

ABSTRAK

Anak dengan disabilitas di daerah pedesaan sebagian besar kurang mendapat pendidikan yang layak. Hal ini dikarenakan pada umumnya keluarga anak dengan disabilitas berada pada kondisi ekonomi yang terbatas, akses menuju sekolah cukup jauh ditambah dengan keterbatasan pengetahuan, pemahaman dan minimnya informasi menyebabkan terkendalanya keluarga dalam menangani anak dan membuat keluarga hanya merawat anak dengan disabilitas seadanya di rumah. Perspektif ekologis meyakini bahwa keluarga, masyarakat sekitar, pemerintah desa serta pemerintah dalam artian luas merupakan unsur-unsur yang berpengaruh besar bagi pemenuhan kebutuhan pendidikan anak dengan disabilitas. Lemahnya keberdayaan masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak dengan disabilitas menjadi fokus utama dalam kajian pembahasan ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlunya meningkatkan keberdayaan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak dengan disabilitas di daerah pedesaan.

Kata kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Pendidikan, Disabilitas

Pendahuluan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak, termasuk penyandang disabilitas. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 serta UUD 1945 pasal 31 mengenai hak dan kewajiban warga negara dan sebagaimana yang termuat dalam undang-undang nomor 19 tahun 2011 mengenai pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*.

Convention on The Rights of Persons with Disabilities (2007, hlm. 3) mengakui bahwa:

Anak-anak dengan disabilitas perlu mendapatkan pemenuhan menyeluruh dari semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental berdasarkan persamaan hak dengan anak-anak lainnya, dan mengingat kembali kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak-pihak negara dari Konvensi Hak-hak Anak, pentingnya akses kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya, kesehatan dan pendidikan serta informasi dan komunikasi, yang memberikan kemampuan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan secara penuh semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Pihak-pihak negara mengakui hak penyandang disabilitas atas pendidikan. Dalam rangka memenuhi hak ini tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama, pihak-pihak negara wajib menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah. (CRPD, 2007, hlm. 16).

Untuk mengembangkan pendidikan formal dibutuhkan sumberdaya pendidikan meliputi tenaga pendidik, kependidikan, dana, sarana dan prasarana. Pada umumnya dana merupakan masalah yang paling pokok dalam melakukan usaha tersebut. Komponen-komponen dalam sumberdaya pendidikan tersebut belum seluruhnya terpenuhi untuk kategori pedesaan.

Sarana untuk pendidikan di pedesaan belum memadai, seperti gedung sekolah, buku pedoman untuk belajar, serta prasarana yang menunjang pendidikan seperti jauhnya lokasi dan sulitnya akses jalan menuju sekolah. Semua yang dibutuhkan tersebut memerlukan biaya, oleh karena itu cukup sulit bagi masyarakat desa untuk mengeluarkan biaya di luar kebutuhan pokoknya (biaya makan, kesehatan, dan lain-lain). Penghasilan yang mereka peroleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hal tersebut sudah menjadi salah satu ciri masyarakat pedesaan sehingga seringkali mereka diidentikkan dengan masyarakat miskin, baik miskin dalam hal materi, sumberdaya manusia, maupun akses terhadap informasi. Masyarakat desa dikatakan miskin karena memiliki ketidakberdayaan dalam beberapa aspek. Pada hakikatnya pemberdayaan diartikan sebagai “proses belajar mengajar yang dilakukan secara terencana untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri manusia sehingga mampu melakukan transformasi sosial.” (Adi, 2008, hlm. 72).

Sekitar 82 persen dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak. Penyandang disabilitas tergolong lebih rentan terhadap kemiskinan di setiap negara, baik diukur dengan indikator ekonomi tradisional seperti PDB atau, secara lebih luas, dalam aspek keuangan non-moneter seperti standar hidup, misalnya pendidikan, kesehatan dan kondisi kehidupan.

Temuan terbaru mengenai perkiraan persentase disabilitas global dalam 40 tahun terakhir menyatakan bahwa 20% populasi orang termiskin di dunia hidup dengan disabilitas dan hampir 80% diantaranya tinggal di negara berpendapatan rendah. Kementerian Kesehatan 2010 melaporkan bahwa penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 6,7 juta penduduk yaitu sekitar 2,6 % dari total penduduk Indonesia (259 juta jiwa). Persentase penyandang disabilitas di daerah pedesaan sebesar 0,83 % lebih tinggi dibanding dengan persentase di daerah perkotaan.

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin, melindungi serta menyediakan pelayanan sosial dasar bagi seluruh warganya termasuk penyandang disabilitas. Pelayanan dasar tersebut di antaranya pelayanan akan kebutuhan pendidikan. Di saat yang sama, keluarga dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang relatif serupa. “Perspektif ekologis meyakini bahwa keluarga, pihak sekolah, pemerintah desa, masyarakat sekitar serta masyarakat dalam artian luas merupakan unsur-unsur yang berpengaruh besar bagi anak.” (Huraerah, 2007, hlm. 53).

Lemahnya keberdayaan masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak dengan disabilitas menjadi fokus utama dalam pembahasan ini. Pemberdayaan dilakukan meliputi sistem sosial yaitu mikrosistem, mesosistem, eksosistem dan makrosistem agar pemberian pelayanan pendidikan bagi anak dengan disabilitas dapat dipenuhi dan ditingkatkan. Mikrosistem meliputi lingkungan terdekat dengan anak yaitu keluarga, lingkungan pertemanan dan sekolah. Mesosistem meliputi hubungan antara

mikrosistem, ekosistem meliputi pihak yang memiliki kebijakan, sedangkan makrosistem meliputi masyarakat secara luas yang memiliki nilai-nilai dan budaya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan pembangunan. Inisiatif dan partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan dalam setiap upaya pemenuhan kebutuhan dan berdasarkan pada sumber-sumber potensi yang dimiliki masyarakat. Penelitian ini merupakan salah satu wilayah pendidikan kebutuhan khusus, karena intervensi yang dilakukan berupa pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pendidikan anak dengan disabilitas baik itu pendidikan formal, informal, dan non formal.

Metode Penelitian

Data dikumpulkan dari sumber-sumber bacaan baik berupa buku dan artikel-artikel ilmiah dari internet, juga melalui observasi non partisipan, dan wawancara langsung pada sumber-sumber yang relevan dengan topik yang dibahas. Pada tahap ini data, fakta dan informasi dicari dan diidentifikasi. Data diseleksi, yang sesuai dengan topik tulisan dipisahkan dari yang tidak sesuai. Data yang sesuai dengan topik tulisan dipisahkan berdasarkan kesesuaiannya dengan sub-sub judul dalam kerangka tulisan.

Data, fakta atau informasi yang diperoleh kemudian diolah dengan cara analisis deskriptif dalam bentuk teks. Data yang telah diolah kemudian ditafsirkan dengan menggunakan metode analisis isi atau *content analysis*. Disini penulis menafsirkan dan mengintisari suatu tulisan ilmiah. Tulisan ditafsirkan secara seimbang dan sesuai fakta yang disajikan. dianalisis secara obyektif, bebas dari kepentingan subyektif.

Analisis dilakukan dengan cara membandingkan intisari-intisari sumber bacaan sebagai hasil pengolahan dan penafsiran data, fakta atau informasi. Pada tahapan ini, dibandingkan pula antara data yang tersedia dengan teori-teori yang relevan. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, maka diungkap permasalahan-permasalahan, kelemahan-kelemahan, kelebihan-kelebihan atau manfaat-manfaatnya. Permasalahan yang ditemukan itu kemudian dicari alternatif pemecahannya. Pemecahan masalah dilakukan dengan cara membandingkan kelemahan dan kelebihan dari cara-cara yang telah ada. Berdasarkan hasil perbandingan itu kemudian diangkat pemecahan masalah yang merupakan kombinasi dari cara pemecahan masalah yang telah ada. Disini, penulis juga mengemukakan argumentasi untuk mendukung alternatif pemecahan masalah yang penulis kemukakan.

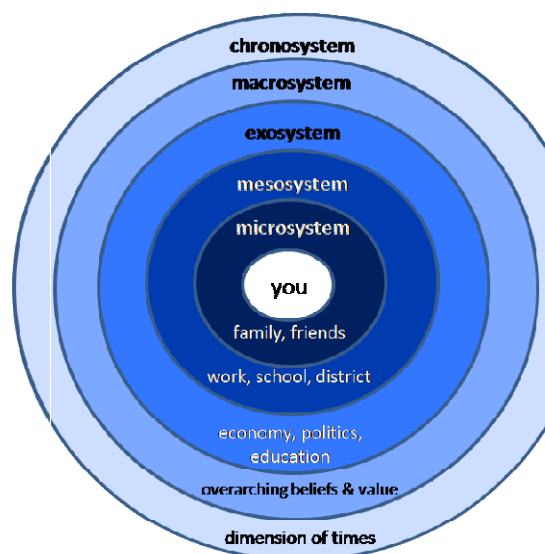
Simpulan dibuat dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu menarik simpulan dari proposisi-proposisi yang khusus yang kemudian digeneralisasikan.

Kajian Literatur

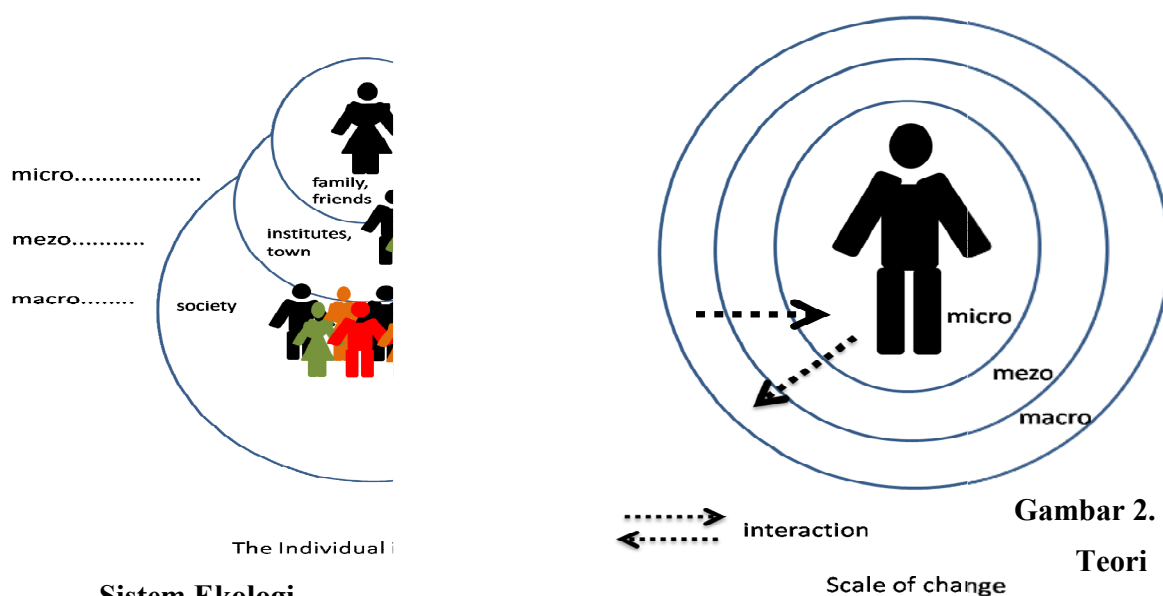
Teori Ekologi

Ekologi adalah cabang sains yang mengkaji interaksi diantara benda hidup dengan alam sekitar. Ekologi berasal dari oikos yaitu habitat dan logos yaitu ilmu. Pada ilmu psikologi, teori ekologi dengan tokohnya Urie Bronfenbrenner menyatakan bahwa perilaku seseorang tidak berdiri sendiri, melainkan dampak dari hasil interaksi orang yang bersangkutan dengan lingkungan di luarnya.

Teori ekologi mengajukan suatu pandangan bahwa lingkungan sangat kuat mempengaruhi perkembangan. Teori ekologi Bronfenbrenner berfokus pada “perkembangan manusia dipengaruhi oleh lima sistem lingkungan, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem dan kronosistem.” (Santrock, 2009: 93).



The Ecological System Theory (basen on Bronfenbrenner 1994)

Gambar 2. 1
Teori

Sumber gambar: Blok, Willem, 1950 – Core Social Work: International Theory, Values and Practice.

Teori ekologi ialah pandangan sosio kultural tentang perkembangan yang terdiri dari lima sistem lingkungan. Lima sistem sosial ini berpengaruh besar terhadap perkembangan seseorang, dalam hal ini ikut mempengaruhi perkembangan anak dengan disabilitas. Seorang anak sebagai individu tidaklah dapat berkembang dengan sendirinya, ia memerlukan orang lain untuk belajar, berkembang dan bertumbuh. Pengalaman belajar tentu menghasilkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seorang anak. Lingkungan pertama yang memberikan pengalaman belajar adalah keluarga kemudian seterusnya adalah lingkungan masyarakat secara luas yang berada di sekitar anak.

Menurut teori ekologi, fokus utamanya adalah pada konteks sosial dimana anak hidup atau tinggal dan orang-orang yang akan mempengaruhi perkembangan anak. Teori ekologi adalah pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan, “yang terdiri dari lima sistem lingkungan mulai dari masukan interaksi langsung dengan agen-agen sosial yang

berkembang hingga masukan kebudayaan yang berbasis luas.” (Santrock, 2009, hlm. 90). Perkembangan dipengaruhi oleh lima sistem lingkungan yang merentang dari interaksi interpersonal sampai ke pengaruh kultur yang lebih luas. Lima sistem tersebut adalah sebagai berikut:

Mikrosistem dalam teori ekologi Bronfenbrenner ialah *setting* dimana individu tinggal. Mikrosistem adalah lingkungan yang paling dekat dengan pribadi anak, meliputi keluarga, guru, teman-teman sebaya, sekolah, lingkungan tetangga dan sebagainya yang sehari-hari ditemui anak. Dalam mikrosistem inilah interaksi yang paling awal dengan agen-agen sosial berlangsung. Individu tidak dipandang sebagai penerima pengalaman yang pasif dalam *setting* ini, tetapi sebagai seseorang yang membangun *setting*. Bronfenbrenner menunjukkan bahwa kebanyakan penelitian tentang dampak-dampak sosiokultural berfokus pada mikrosistem.

Mesosistem adalah interaksi antar faktor-faktor dalam sistem mikro. Meliputi hubungan antara beberapa mikrosistem atau beberapa konteks. Misalnya hubungan orang tua dan guru, orang tua dan teman, antar teman, guru dan teman, dapat juga hubungan antara pengalaman sekolah dengan pengalaman keluarga, pengalaman sekolah dengan pengalaman keagamaan dan pengalaman keluarga dengan pengalaman teman sebaya. Misalnya anak-anak yang orang tuanya menolak mereka dapat mengalami kesulitan mengembangkan hubungan positif dengan guru.

Eksosistem dalam teori Bronfenbrenner dilibatkan ketika pengalaman-pengalaman dalam *setting* sosial lain – dimana individu tidak memiliki peran yang aktif – mempengaruhi apa yang individu alami dalam konteks yang dekat. Sederhananya, menurut eksosistem melibatkan pengalaman individu yang tak memiliki peran aktif di dalamnya. Misalnya, pengalaman kerja dapat mempengaruhi hubungan seorang istri dengan suami dan anaknya. Seorang ibu dapat menerima promosi yang menuntutnya melakukan lebih banyak perjalanan yang dapat meningkatkan konflik perkawinan dan perubahan pola interaksi orang tua dan anak. Maka diketahui bahwa eksosistem tidak langsung menyentuh pribadi anak akan tetapi masih besar pengaruhnya seperti koran, televisi, dokter, keluarga besar, dan lain-lain.

Makrosistem meliputi kebudayaan dimana individu hidup. Kita ketahui bahwa kebudayaan mengacu pada pola perilaku, keyakinan, dan semua produk lain dari sekelompok manusia yang diteruskan dari generasi ke generasi. Kita ketahui pula bahwa studi lintas budaya –perbandingan antara satu kebudayaan dengan satu atau lebih kebudayaan lain– memberi informasi tentang generalitas perkembangan. Makrosistem terdiri dari ideologi negara, pemerintah, tradisi, agama, hukum, adat istiadat, budaya, dan lain-lain.

Kronosistem, dalam teori ekologi Bronfenbrenner meliputi pemolaan peristiwa-peristiwa lingkungan dan transisi sepanjang rangkaian kehidupan dan keadaan sosiohistoris. Misalnya dalam mempelajari dampak perceraian terhadap anak-anak, Para peneliti menemukan bahwa dampak negatif sering memuncak pada tahun pertama setelah perceraian dan bahwa dampaknya lebih negatif bagi anak laki-laki daripada anak perempuan. Dua tahun setelah perceraian interaksi keluarga tidak begitu kacau lagi dan lebih stabil dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan sosiohistoris, dewasa ini, kaum perempuan tampaknya sangat didorong untuk meniti karir dibandingkan pada 20 atau 30 tahun yang lalu. Dengan cara seperti ini, kronosistem memiliki dampak yang kuat pada perkembangan anak.

Berdasarkan makalah yang ditulis oleh Andayani (2011) menyatakan bahwa pemahaman mengenai bagaimana mendidik anak, khususnya anak dengan disabilitas merupakan suatu hal yang penting untuk diketahui oleh orangtua, guru sekolah, dan masyarakat di lingkungan sekitar anak. Pemenuhan kebutuhan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat bagi anak dengan disabilitas merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat membantu anak berkembang. Anak dengan disabilitas dapat berkembang dengan baik

jika lingkungannya dapat menyediakan kondisi-kondisi yang cukup untuk mendukung pemenuhan pendidikan anak.

Betapa masyarakat memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan anak dengan disabilitas. Semua sistem dalam masyarakat tersebut saling pengaruh mempengaruhi dan berdampak terhadap berbagai perubahan dalam perkembangan anak. Oleh karena itu, seluruh komponen sistem berpengaruh terhadap pengasuhan (*nurturing*) dan pendidikan anak secara holistik.

Paradigma baru dalam pendidikan anak, menekankan pada penanganan *nurturing* oleh semua pihak berkenaan dengan tumbuh kembang anak yang bersifat holistik, unik dan terarah. Dalam perkembangannya, anak mempunyai berbagai kebutuhan, yang perlu dipenuhi, yaitu kebutuhan primer yang mencakup pangan, sandang, dan papan, serta kasih sayang, perhatian, rasa aman, dan penghargaan terhadap dirinya sebagaimana teori kebutuhan dari Maslow (1978).

Terpenuhinya kebutuhan tersebut akan memungkinkan anak mendapat peluang mengaktualisasikan dirinya, dan hal ini dapat menghadirkan hal positif untuk mengembangkan seluruh potensi secara utuh. Pemenuhan kebutuhan dalam perkembangan ini banyak tergantung dari cara lingkungan berinteraksi dengan anak-anak. Perkembangan anak ditentukan oleh berbagai fungsi lingkungan yang saling berinteraksi dengan individu, melalui pendekatan yang sifatnya memberikan perhatian, kasih sayang dan peluang untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan taraf dan kebutuhan perkembangannya.

Untuk mengembangkan potensi anak dan menciptakan generasi yang berkualitas maka kita perlu memperhatikan berbagai faktor dari lingkungan dimana anak tersebut menjalani proses pertumbuhan. Oleh sebab itu perlu adanya kerja sama dari segala pihak/lingkungan yang sehari-hari berinteraksi sosial dengan anak agar proses perkembangan anak cenderung ke arah yang positif.

Anak dengan Disabilitas

Merujuk pada Konvensi Hak-hak Anak United Nation Children's Found (UNICEF) dan disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989: "Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak, ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal". "Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi." (Undang-undang no 23, 2002).

Perlindungan bagi anak tersebut juga ditujukan bagi anak disabilitas yang berhak untuk memperoleh kehidupan yang layak secara fisik, mental, spiritual dan sosial. Anak disabilitas diamanatkan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan atau aksesibilitas dalam memperoleh hak-haknya, termasuk memperoleh hak atas pendidikan.

Kondisi disabilitas mengarah kepada keterbatasan fungsi individu di masyarakat yang disebabkan oleh kondisi hambatan/kerusakan organ tubuh sehingga menghalangi kesempatan untuk hidup sebagaimana masyarakat lainnya dan kemampuan untuk mengakses sumber kemasyarakatan yang ada. UU RI No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD menyebutkan bahwa:

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat memenuhi hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Selain itu, International Classification of Functioning, Health and Disabilities (ICF - WHO, 2001) juga mendefinisikan disabilitas sebagai konsep multi-dimensional, terkait

dengan tiga komponen yaitu struktur dan fungsi tubuh seseorang, bidang kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari, dan faktor-faktor dalam lingkungan yang mempengaruhi pengalaman hidupnya, termasuk faktor sikap.

Anak dengan disabilitas yang jumlahnya masih cukup besar di Indonesia, menurut hasil pendataan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Kementerian Sosial (2009) di 24 propinsi, terdapat 65.727 anak, yang terdiri dari 78.412 anak dengan kedisabilitas ringan, 74.603 anak dengan kedisabilitas sedang dan 46.148 anak dengan kedisabilitas berat.

Kajian Kementrian Sosial tahun 2008 menunjukkan sebagian besar anak dengan disabilitas berada dalam keluarga miskin, yang faktanya menunjukkan mereka sulit mendapatkan hak dasarnya sebagai anak secara wajar dan memadai. Banyak situasi anak dengan disabilitas pada keluarga miskin tidak terpenuhi kebutuhan nutrisi, tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan khusus sesuai kedisabilitasnya dari orangtua/keluarga, kondisi khas karena berbagai keterbatasan kemampuan keluarga miskin.

Orientasi orangtua lebih prioritas pada upaya untuk memenuhi kelangsungan hidup keluarga, dan mengabaikan keperluan anaknya yang disabilitas karena sumber dana yang terbatas. Tingkat pendidikan ibu bapak yang rendah, mengakibatkan ketidaktahuan ibu bapak tentang bagaimana mengasuh atau memberi stimulus yang tepat bagi perkembangan anaknya yang disabilitas.

“Kondisi lain adalah ibu bapak secara sosial dan psikologis belum siap menerima anak dengan disabilitas, bahkan ada ibu bapak menolak kehadiran anaknya yang mengalami disabilitas.” (Hikmat, 2010, hlm. 24). “Stigma masyarakat terhadap anak disabilitas terkadang masih kuat pada masyarakat sekarang ini, karena rendahnya pengetahuan dan faktor sosial budaya” (Janene, 2002, hlm. 18). Anak diisolasi didiskriminasi dalam pengasuhan dan tidak tersentuh oleh pelayanan sosial dasar, antara lain pelayanan kesehatan, pendidikan, pemukiman yang layak serta tidak memiliki alat bantu kecacatan.

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (2010, hlm. 58): Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan. Kekuatan dan kemampuan yang dimaksud adalah dalam:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. (Parsons dalam Suharto, 2010, hlm. 59).

Berdasarkan definisi-definisi pemberdayaan yang telah disebutkan, dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan individu yang mengalami masalah. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin

dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan sering kali digunakan sebagai indikator pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Soetarso (1991, hlm 102) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya mempunyai dua pengertian yang saling berkaitan, yaitu :

- 1) Peningkatan kemampuan, motivasi dan peran semua unsur masyarakat agar dapat menjadi sumber yang langsung untuk mendukung semua bentuk usaha kesejahteraan sosial.
- 2) Pemanfaatan sumber masyarakat yang telah ditingkatkan kemampuan, motivasi dan perannya.

Berbagai konsep di atas merupakan dasar dari kegiatan yang dilakukan praktikan dalam aktifitas pengembangan masyarakat (*community development*) dengan mengembangkan perspektif *strenght*. Proses pemberdayaan yang dilakukan, praktikan berupaya menumbuhkan kesadaran dan kemandirian secara merata pada masyarakat. Penggalan potensi atau sumber daya masyarakat dilakukan dengan meningkatkan peranan kerja sama dengan kelompok sasaran dalam upaya peningkatan kemampuan diri (*self help*) untuk dapat mengatasi dan memenuhi kebutuhan dan dalam mendukung terpenuhinya kebutuhan dan penanganan permasalahan penyandang disabilitas.

Menurut Chamber (1996, hlm 78): “pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan yang merangkum nilai nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yakni bersifat *people-centered, participatory, empowering and sustainable*.”

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, keterlibatan kaum disabilitas dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tdiak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat (instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta, dan pihak lainnya), serta dilaksanakan secara berkelanjutan.

Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan

Drost (1998, hlm. 5) menyatakan bahwa “pendidikan adalah upaya untuk membantu peserta didik mengembangkan dirinya dalam dimensi intelektual, moral, dan psikologis. Pendidikan sejak awal adalah tugas orang tua dan masyarakat.”

Sementara Darkenwald et al (1992, hlm. 8) menyatakan bahwa:

... the general purpose of education is to foster the growth of what is individual in each human being, at the some time harmonizing the individual, thus educated with the organic unity of the social group to which the individual belongs. Artinya, ... maksud dan tujuan pendidikan bukan hanya membantu berkembangnya pribadi dalam pengertian individu semata, akan tetapi juga seharusnya dapat mendidik individu dalam keharmonisan kehidupan individunya dengan kesatuan dan kesatuan kelompok sosialnya.

Pendidikan secara umum ialah setiap sesuatu yang mempunyai pengaruh dalam pembentukan jasmani seseorang, akal nya dan akhlak nya sejak dilahirkan hingga dia mati.

Pendidikan dengan pengertian ini meliputi semua sarana, baik disengaja seperti pendidikan dilingkungan keluarga (*rumah*), dan pendidikan sekolah, atau yang tidak disengaja seperti pendidikan yang datang dari pengaruh lingkungan sosial kemasyarakatan dalam pergaulan kesehatan atau yang bersifat alamiah dan lain-lain. Pendidikan dalam pengertian ini, sama dengan pengertian bahwa kehidupan itu sendiri atau dalam artian sesungguhnya bahwa segala bentuk hubungan manusia baik di lingkungan keluarga, lingkungan alam dalam kehidupan ini dianggap sebagai sebuah proses pembelajaran dengan anggapan bahwa dimulai dari sejak terlahir sampai keliang lahat.

Menurut Alimin, fungsi pendidikan kebutuhan khusus sebagai disiplin ilmu yaitu:

(1) Fungsi preventif, (2) Fungsi kompensasi, (3) Fungsi intervensi. Fungsi preventif adalah upaya pencegahan agar tidak muncul hambatan belajar dan hambatan perkembangan akibat dari kebutuhan khusus tertentu. Fungsi kompensasi diartikan sebagai upaya pendidikan untuk menggantikan fungsi yang hilang atau mengalami hambatan dengan fungsi yang lain. Fungsi intervensi diartikan sebagai upaya menangani hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang sudah terjadi pada diri anak. (Alimin, 2007, hlm. 06)

Morris dalam *The American Heritage Dictionary* menjelaskan bahwa “*need is a condition or situation in which something necessary or desirable is required or wanted*” (Morris, 2006, hlm. 878). Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kebutuhan adalah suatu keadaan atau situasi yang di dalamnya terdapat sesuatu yang perlu atau ingin di penuhi. Sesuatu yang ingin dipenuhi itu dianggap perlu, penting, atau harus dipenuhi dengan segera.

Burton dan Merrill (1977) menjelaskan bahwa “*need is a discrepancy between what it is and what should be*”. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kebutuhan adalah perbedaan antara suatu kenyataan yang seharusnya ada dengan suatu kenyataan yang ada pada saat ini.

Pemenuhan kebutuhan pendidikan adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan seseorang akan hal pendidikan, yaitu berkaitan dengan sesuatu yang harus dipelajari oleh seseorang guna kemajuan kehidupan dirinya, dan atau untuk kemajuan masyarakat. Pendidikan yang dimaksud yaitu meliputi pendidikan formal, informal dan non formal.

Pembahasan

Kondisi empirik menunjukkan bahwa anak dengan disabilitas sangat memerlukan dukungan sosial dari keluarga maupun dari lingkungan masyarakat. Masalah yang dihadapi oleh anak dengan disabilitas adalah masih rendahnya dukungan sosial, terutama karena rendahnya pemahaman, pengetahuan, keterampilan dan kepedulian keluarga dan masyarakat pada anak dengan disabilitas.

Pentingnya dukungan sosial dari lingkungan anak dengan disabilitas, bisa dikaji berdasarkan teori sistem (*system theory*), bahwa anak dengan disabilitas sebagai bagian dari sistem keluarga maupun kemasyarakatan, akan terpengaruh dan mempengaruhi secara timbal balik.

Teori sistem termasuk konsep yang menekankan interaksi dan hubungan antara berbagai variasi sistem, termasuk antara individu, keluarga, kelompok, organisasi dan masyarakat. Pendekatan teori sistem juga berkaitan dengan beberapa konsep dasar dari perspektif ekologi. Pandangannya bahwa individu selalu berada dalam interaksi dengan berbagai sistem dalam lingkungannya.

“Memberdayakan keluarga merupakan jalan terbaik untuk membantu perkembangan anak secara sehat.” (Dubois, et al, 2005, hlm 180). Kondisi tersebut bila kita memandang keluarga sebagai suatu sistem mесо, yang akan berpengaruh terhadap sistem mikro yaitu

anak disabilitas dalam keluarga. Sifat suatu sistem bahwa elemen-elemen atau bagian-bagian sistem akan saling berinteraksi agar keseluruhan sistem dapat berfungsi.

Berdasarkan teori sistem ekologi, penelitian ini mengarah untuk memperkuat dukungan keluarga, dan lingkungan anak sebagai sebuah sistem yang memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan terbaik bagi perkembangan anak dengan disabilitas. *Family support* dalam teori sistem adalah upaya untuk membuat perubahan fungsi keluarga. Menurut Newman et al (2004, hlm 160) bahwa “satu satunya cara guna membuat perubahan fungsi salah satu anggota keluarga adalah dengan mengubah fungsi dari anggota keluarga lain dalam sistem keluarga tersebut.”

Berkaitan dengan teori sistem, diperlukan proses pemberdayaan pada keluarga dan masyarakat secara luas. “Keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi tumbuh kembang anak.” (Gerungan, 1987, hlm 75). Keluarga juga dipandang sebagai kerangka kerja untuk analisis, asesmen, dan intervensi dalam prakteknya pada anak. Prinsip ini dikenali dengan pendekatan “*person-in-environment* dan *person-in-situation*”, dalam artian melihat klien selalu berada dalam pengaruh lingkungannya atau situasinya. (DuBois, et al, 2005, hlm 87).

Keluarga tinggal dalam komunitas lokal, dan menjadi subsistem dari sistem yang lebih besar yaitu masyarakat dikenal juga dengan sistem makro. Pengaruh lingkungan sosial akan terasa pula oleh anggota keluarga. Komunitas penting bagi anak dengan disabilitas dalam dua hal, menurut Hanvey (2002, hlm. 56), yaitu:

Pertama dapat mendukung anak disabilitas dan keluarganya rasa memiliki sebagai bagian dari anggota komunitas, merupakan jaringan dukungan sosial informal karena dapat berpartisipasi dalam kehidupan komunitas. *Kedua*, merupakan sumber dukungan seperti pengasuhan anak, pendidikan, dukungan layanan bagi anak disabilitas, pelayanan kesehatan dan rekreasi.

Perspektif teori sistem dilengkapi dengan perspektif ekologi. Perspektif ekologi memberikan suatu dasar untuk model kehidupan yang dikembangkan oleh Urie Bronfenbrenner. Model ini menyarankan bahwa sifat dari interaksi antara orang dengan lingkungan mereka adalah sumber kebutuhan manusia dan masalah sosial. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan sistem dukungan / keberdayaan keluarga dan lingkungan, sehingga memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan pada anak disabilitas dengan memadukan kapasitas adaptif orang dengan lingkungannya. Anak dengan disabilitas perlu mendapat dukungan yang optimal dari orang-orang/lingkungan sekitar anak. Merujuk kepada bagaimana peranan dari orang-orang di sekitar anak yang berpengaruh terhadap anak.

Beberapa konsep di atas merupakan dasar pembuktian bahwa pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan agar menumbuhkan kesadaran dan kemandirian secara merata pada masyarakat. Penggalan potensi atau sumber daya masyarakat dilakukan dengan meningkatkan peranan kerja sama dengan kelompok sasaran dalam upaya peningkatan kemampuan diri (*self help*) untuk dapat mengatasi dan memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak dengan disabilitas.

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan anak dengan disabilitas, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, melibatkan penyandang disabilitas, keluarga, dan berbagai pihak terkait (instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta, dan pihak lainnya), serta dilaksanakan secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat sehingga kebutuhan pendidikan anak dengan disabilitas di daerah pedesaan dapat terpenuhi. Pemberdayaan masyarakat dapat memberikan perubahan dan dampak yang besar serta berkelanjutan bagi pemenuhan kebutuhan pendidikan anak dengan disabilitas di daerah pedesaan. Sesuai dengan filosofi pemberdayaan masyarakat, masyarakat tidak hanya menjadi objek tetapi juga menjadi pelaku dari perubahan-perubahan yang dilakukan melalui diterapkannya model pemberdayaan ini. Berdasarkan hasil studi literatur mengenai pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak dengan disabilitas di daerah pedesaan dan sebagaimana yang telah diuraikan dalam kesimpulan, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk menjadi rekomendasi adalah sebagai berikut:

1. Bagi keluarga anak dengan disabilitas di daerah pedesaan

Anak sebagai generasi penerus masa depan sebuah keluarga dan bangsa menuju kemajuan yang lebih baik. Anak dengan disabilitas memiliki hak dan kebutuhan yang sama yang harus dipenuhi. Bukan satu hal yang tidak mungkin bagi anak dengan disabilitas tidak bisa mengembangkan potensi bakat dan minat yang ada dalam dirinya sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak bangsa yang cerdas, berkualitas dan terasah potensinya.

Terus berusaha mengembangkan potensi yang ada merupakan satu pijakan untuk mencapai titik keberhasilan sehingga mereka bisa menata kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Perlu adanya pendampingan bagi anak-anak tersebut sehingga mereka dapat melakukan pengembangan kreatifitasnya secara terarah. Pentingnya pengawasan untuk anak-anak tersebut sehingga mereka merasa terlindungi. Anak harus sering berbaur dan berinteraksi sosial dengan lingkungan di sekitarnya sehingga mereka tidak lagi menutup diri terhadap keadaan di sekelilingnya.

2. Bagi anggota / Kader Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)

Pembinaan bagi orang tua anak dengan disabilitas perlu terus dilakukan sehingga orang tua mampu memahami masalah dan kebutuhan anak-anak mereka. *Parenting skill* untuk orang tua anak dengan disabilitas harus secara rutin dilakukan baik oleh pengurus RBM ataupun dengan mendatangkan narasumber ahli untuk memberikan pembelajaran bagi mereka. Orang tua anak dengan disabilitas ataupun keluarganya memerlukan pendampingan sehingga setelah kegiatan penelitian ini berakhir kegiatan, mereka tetap dapat berjalan seperti yang sudah dilakukan bersama peneliti. Peneliti berharap orang tua anak dengan disabilitas memiliki bekal pemahaman yang cukup untuk menjaga dan meningkatkan taraf kesejahteraan mereka. Kekompakan dan kebersamaan diantara orang tua anak dengan disabilitas perlu terus dilakukan sehingga mereka bisa saling bertukar pikiran dan memiliki pemahaman tentang perawatan anak-anak mereka dikemudian hari. Orang tua tidak lagi dihadapkan pada satu dilema ketika memiliki anak dengan disabilitas. Mereka dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya tanpa ada lagi perasaan malu bahkan menutup diri dengan lingkungan sosialnya.

3. Bagi Masyarakat Daerah pedesaan

Masyarakat diharapkan dapat lebih peduli terhadap kondisi yang dialami oleh anak dengan disabilitas dan keluarganya. Dukungan dan peran serta masyarakat dalam hal ini sangat besar sekali pengaruhnya sehingga mereka dapat berkontribusi secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan pendidikan anak dengan disabilitas yang ada di Daerah pedesaan. Stigma buruk di masyarakat tentang keberadaan

anak dengan disabilitas bukan lagi dijadikan sebuah alasan bagi mereka untuk tidak memiliki kepedulian terhadap sesama.

4. Bagi Pemerintah Daerah pedesaan

RBM yang ada di daerah pedesaan memerlukan dukungan dan pendampingan dari pemerintahan desa setempat sehingga mampu menunjang keberhasilan pengembangan RBM. RBM sudah banyak memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pendidikan anak dengan disabilitas dan keluarganya di wilayah daerah pedesaan. Pemerintah daerah pedesaan diharapkan dapat mengalokasikan dana anggaran desa untuk kegiatan RBM, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap RBM yang ada di daerah pedesaan. Pemerintahan Desa juga diharapkan mampu melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi yang lebih tinggi seperti kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dalam mendukung keberadaan organisasi lokal yang memiliki kepedulian terhadap anak dengan disabilitas agar mendapatkan perhatian. Hal lain yang perlu dikembangkan oleh pemerintahan desa yaitu berperan serta dalam melakukan jejaring dengan CSR atau dunia usaha sebagai bentuk dukungan keberadaan organisasi lokal yang memiliki kepedulian terhadap pemenuhan pendidikan anak dengan disabilitas. Pemerintah Desa juga diharapkan mampu menghimbau dan mengajak kepada masyarakat di daerah pedesaan agar berperan serta untuk memberikan perlindungan dan perhatian kepada anak dengan disabilitas sehingga mampu mencapai tingkat kesejahteraan.

5. Bagi instansi terkait

Keberadaan RBM sebagai wadah apresiasi masyarakat dalam upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan anak dengan disabilitas pada waktu penelitian menunjukkan adanya peningkatan, namun tetap tidak dapat menjalankan sendiri dalam mengembangkan RBM untuk dapat melakukan kegiatan terkait dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan anak dengan disabilitas secara berkelanjutan. Sehubungan hal tersebut perlu mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah melalui instansi seperti Dinas sosial Kabupaten Bandung, Dinas sosial Propinsi Jawa Barat agar RBM yang ada di daerah pedesaan mampu untuk melaksanakan kegiatan yang berkelanjutan. Instansi terkait tersebut diharapkan mampu melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan sehingga RBM yang ada mampu berdiri menjadi organisasi yang lebih kuat dan kokoh dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan kemanusiaan. Hal ini tentunya membantu kepentingan masyarakat terutama penyandang disabilitas dan keluarganya sehingga mampu mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

- Adi, I. R. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Alimin, Z. (2007). *Modul Hambatan Belajar dan Perkembangan I*. Bandung: Pascasarjana Prodi Pendidikan Kebutuhan Khusus UPI.
- Andayani, R. H. R. (2011). *Dukungan Sosial Masyarakat dalam Mempengaruhi Perkembangan Anak Disabilitas Fisik*. Child Poverty and Social Protection Conference.
- Burton, J. K., and Merrill, P. F. (1991). *Needs Assessment: Goal, Needs and Priorities*. In L. J. Briggs, K. L. Gustafson, & Tillman, M. H. (Eds.), *Instructional design principles and applications* (pp. 17-43). Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications.
- Blok, W. (1950). *Core Social Work: International Theory, Values and Practice*. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Chamber, R. (1996). *Participatory Rural Appraisal, Memahami Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Darkenwald, G. & Merriam, S.B. (1992). *Adult Education Foundation of Practice*. New York: Harper and Row, Publisher.
- Drost, S.J.I.G. (1998). *Sekolah, Mengajar atau Mendidik*, Yogyakarta. Kanisius.
- DuBois, B. and Miley, K. (2005). *Social work an empowering profession*. USA. Pearson Education, Inc.
- Gerungan, W. A. (1997). *Psikologi Sosial*. Bandung : Refika Aditama.
- Hanvey, L. (2002). *Children with disabilities and their families in Canada*. www.nationalchildrensalliance.com/nca/pubs/2002/hanvey02
- Hikmat, H. (2010). *Jumlah anak cacat di Indonesia*. Antara News. <http://antajawabarat.com>.
- Huraerah, A. (2007). *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat, Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Janene B. (2002). *Disability in Indonesia : life is challenging for people with disabilities in Indonesia*. Copyright 1996-2009 © Inside Indonesia
- Moorris, W. (2006). *The American Heritage Dictionary*. [Online]. Tersedia di: <http://www.americanheritageamish.com.html>. [Diakses 12 Februari 2014].
- Newman, B. M and Philip, R. (2006). *Development through life*. Ninth ed. USA. Thomson Wadsworth.
- Santrock. (2009). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Soetarso. (1991). *Praktek Pekerjaan Sosial dalam Pembangunan Masyarakat*. Bandung: KOPMA STKS.
- Suharto, E. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

